BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Jambi, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Berdasarkan analisis terhadap kolaborasi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mitigasi banjir di Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa penerapan aspek-aspek kolaborasi seperti komunikasi, komitmen, saling percaya, dan transparansi memang telah mulai diterapkan, namun dalam implementasinya masih belum terlaksana secara optimal dan merata. Kolaborasi antar instansi, khususnya antara BPBD Provinsi Jambi, Dinas Damkarta Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, dan Stasiun BMKG Sultan Thaha Jambi, telah memperlihatkan keterlibatan mereka dalam beberapa tahapan mitigasi seperti pemetaan titik banjir, pemantauan curah hujan, penyebaran informasi peringatan dini, hingga penyediaan bantuan logistik. Namun demikian, penerapan kolaborasi tersebut belum dapat dikatakan berjalan efektif sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih adanya pola kerja yang bersifat sektoral dan informal, kurangnya mekanisme koordinasi yang sistematis, belum terlaksananya sosialisasi tatap muka langsung kepada masyarakat terdampak banjir, serta belum adanya perjanjian

kerja sama formal sebagai dasar hukum pelaksanaan kolaborasi. Komunikasi antar lembaga memang sudah dilakukan melalui berbagai saluran, namun belum terstandar dan masih bergantung pada inisiatif masing-masing pihak. Komitmen dalam menjalankan tanggung jawab mitigasi pun belum ditopang oleh sumber daya dan anggaran yang seimbang antarinstansi. Selain itu, proses membangun kepercayaan dan keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyampaikan informasi kebencanaan secara langsung, menyeluruh, dan tepat waktu.

4.1.2 Ketidakefektifan penerapan aspek kolaborasi dalam mitigasi banjir di Kota Jambi disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Hambatan utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat, yang menunjukkan lemahnya komunikasi dan transparansi informasi dari pemerintah. Informasi terkait evakuasi dan kesiapsiagaan tidak tersampaikan secara merata, sehingga warga kurang memahami peran mereka dalam sistem mitigasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, logistik, dan sumber daya manusia menghambat pelaksanaan di lapangan, meskipun terdapat komitmen dari instansi terkait. Hal ini memperlihatkan bahwa kolaborasi belum didukung oleh kapasitas yang memadai. Dari sisi kelembagaan, belum adanya BPBD di tingkat Kota Jambi memperlemah koordinasi teknis dan kejelasan pembagian peran. Di samping itu, ancaman keselamatan, seperti kemunculan hewan liar dan potensi pencurian saat evakuasi, menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap

sistem mitigasi belum terbentuk secara utuh, sehingga masyarakat cenderung bertindak sendiri. Dengan demikian, meskipun kolaborasi antar instansi sudah berjalan, penerapannya belum optimal dan belum cukup efektif membentuk sistem mitigasi yang tanggap dan berkelanjutan. Diperlukan penguatan kelembagaan, komunikasi, peran yang terkoordinasi, serta pembangunan kepercayaan agar kolaborasi benar-benar mampu melindungi masyarakat secara menyeluruh.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kolaborasi Pemerintah Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Jambi, serta memperhatikan berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya, peneliti memberikan beberapa saran dengan tujuan agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara praktis maupun akademik. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.1 Saran untuk *Stakeholder* Terkait

Bagi stakeholder terkait, khususnya instansi pemerintah seperti BPBD Provinsi Jambi, Dinas Damkarta Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, dan Stasiun BMKG Sultan Thaha Jambi, diperlukan langkah nyata untuk memperkuat kolaborasi yang selama ini masih berjalan secara informal dan sektoral. Kolaborasi antar lembaga perlu diformalkan melalui perjanjian kerjasama tertulis yang mengatur pembagian peran, mekanisme koordinasi, dan sistem komunikasi dalam situasi pra-bencana, tanggap darurat, maupun

pascabencana. Pemerintah Kota Jambi juga disarankan untuk segera membentuk BPBD tingkat kota sebagai lembaga permanen yang khusus menangani kebencanaan secara terintegrasi. Selain itu, peningkatan kualitas komunikasi dengan masyarakat menjadi penting, tidak hanya dalam penyampaian informasi satu arah, tetapi juga melalui pendekatan partisipatif yang mendorong keterlibatan warga secara aktif dalam setiap tahapan mitigasi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur pendukung, serta jaminan keselamatan selama evakuasi juga menjadi aspek penting yang perlu dibenahi agar sistem mitigasi lebih responsif, inklusif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat secara menyeluruh.

4.2.2 Saran untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan mitigasi banjir dalam kerangka otonomi daerah, khususnya setelah terbentuknya BPBD Kota Jambi apabila sudah terealisasi. Selain itu, kajian mengenai kolaborasi dalam mitigasi bencana juga dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih luas, mencakup perluasan wilayah, peningkatan jumlah partisipan, serta penerapan pendekatan multidisiplin. Penelitian berikutnya disarankan pula untuk dapat mengeksplorasi kontribusi masyarakat, LSM, dan sektor swasta dalam memperkuat upaya mitigasi bencana banjir. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam merumuskan kebijakan mitigasi yang adaptif dan berbasis kolaborasi antar aktor secara menyeluruh.